



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SEMARANG  
Nomor : 421.9 / 2130.B / 2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
NGEJAR KAWERUH, BANJASARI DESA BANCAK, KECAMATAN BANCAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- Menimbang
- bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ijin Pendirian PKBM NGEJAR KAWERUH Tanggal 10 Februari 2019 Nomor 03/ PKBM.NK/II/ 2019
  - bahwa sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di masyarakat, selain penyediaan jalur pendidikan formal perlu juga penyediaan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat langsung;
  - bahwa agar kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengelola PKBM NGEJAR KAWERUH Dusun Banjarsari RT 01 RW 08 Desa Bancak, Kec. Bancak berjalan tertib dan lancar serta pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

12. PP no 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan .
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pendirian Lembaga Kursus / Pendidikan Non Formal di Kabupaten Semarang)
19. Peraturan daerah kabupaten semarang nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA :

Memberikan Ijin Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

kepada :

Nama Lembaga : PKBM NGEJAR KAWERUH

Nama Ketua : Khairul Anwar

Alamat Lembaga : Dusun Banjarsari, RT 01 RW 08 Desa Bancak  
Kec. Bancak, Kab. Semarang

KEDUA :

Tugas dan tanggung jawab Lembaga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan aktifitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Mintaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang diberikan.

KETIGA :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga sebagaimana Diktum PERTAMA;

KEEMPAT :

Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kesalahan pada Keputusan ini maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA :

Keputusan ini berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran  
Pada tanggal : 3 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,  
Kemudian dan Olahraga  
Kabupaten Semarang



Purwanton Purtomo Priyatmo, SH, MM.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan :

1. Korwil Bid. Pendidikan Kecamatan Bancak
2. Lembaga yang Bersangkutan
3. Pertinggal